

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama antar negara dapat terjadi dalam bidang keamanan, ekonomi, budaya, dan lain – lain. Kerjasama dalam hubungan internasional menurut Dougherty dan Pfaltzgraff dapat didefinisikan sebagai (Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997, hlm 9) : Serangkaian hubungan - hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Suatu kerjasama dapat dijalin apabila mempunyai aturan dan kesepakatan yang mengikat antar dua negara yang telah disetujui sebelumnya.

Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang unik, dengan sistem politik, ekonomi, agama, ideologi nasional, pengalaman sejarah serta identitas bangsa yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan, sehingga pernah dipantau “tidak ada dua negara tetangga di dunia ini yang lebih berbeda daripada Australia dan Indonesia” oleh mantan Menlu Australia Gareth Evans.(Evan, G & Grant, B. Melbourne University Press. 1991, hlm 184). Kendati agak berbeda, sebagai negara-negara tetangga, tentu saja Indonesia dan Australia pantas berusaha agar menjalin kemudian menjaga sebuah hubungan yang konstruktif, terbuka, bersifat saling menolong, menghormati dan saling memahami.

Awal mula hubungan Indonesia dan Australia terjadi karena Australia merupakan salah satu negara Barat yang simpatik terhadap perjuangan Indonesia yang ingin lepas dari belenggu penjajahan dan mencapai suatu kemerdekaan. Dinamika hubungan Indonesia dengan Australia bersifat naik-turun kadang kala hubungan kedua negara ini membaik tapi tidak jarang juga bersitegang. Hubungan Australia dan Indonesia menjadi beku karena Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri terkesan militan. Hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik setelah kejatuhan rezim orde lama yang dipimpin Soekarno dan

munculnya Soeharto, dan juga sebelum masalah Timor Timur menjadi isu utama antara Australia dan Indonesia.

Hubungan negara bertetangga Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah seperti masalah Timor Timur pada 1999, peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia terganggu. Di sisi lain, berbagai bentuk kerja sama ekonomi, keamanan, pariwisata dan sebagainya menguatkan hubungan bilateral kedua negara (Richard Chauvel dkk. Granit.2005, hlm 6-12).

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. sebab secara geografis kedua negara tersebut berdekatan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN.

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia adalah kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Kerjasama ekspor impor daging sapi ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia.

Di bidang ekonomi Indonesia dan Australia dengan gembira mengumumkan kesepakatan untuk memulai negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia. Dalam semangat kerjasama, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar kepolisian dalam upaya untuk

mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara, dan memperkuat upaya kontra-terorisme, pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, khususnya dalam memberantas terorisme (austembjak.or.id, 2012).

Oleh karena itu, sebuah Perjanjian IA-CEPA merupakan suatu kesempatan untuk menciptakan perubahan dalam hubungan Indonesia-Australia karena kedua negara memasuki tahapan kerjasama dan hubungan baik yang belum pernah ada sebelumnya. Ada sebuah komplementaritas antara perekonomian Australia dan Indonesia yang memungkinkan terjadinya peningkatan kemakmuran ekonomi bersama.

Dalam perundingan IA-CEPA 4 Oktober 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wijaya menyampaikan kebijakan import hortikultura dan daging sapi, bahwa Indonesia kini lebih terbuka dan transparan (Kementerian Perdagangan, 2013, slide 1).

Adapun tahap-tahap perundingan IACEPA yang pertama dilaksanakan pada tanggal 26-27 maret 2012 di Jakarta, tahap pertama pada perundingan ini adalah untuk membangun kerjasama bilateral di kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dengan Australia. Jenis-jenis kerjasama yang akan dilakukan salah satunya adalah impor daging sapi. Tahap perundingan kedua yaitu pada tanggal 29-31 Juli 2013 di laksanakan di Canberra. Pada tahap perundingan yang kedua ini, dari masing-masing kedua negara tersebut sempat ada perselisihan, terutama dari Indonesia. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan adanya kerjasama IACEPA tersebut, maka dari itu pada awal tahun 2014 -tahun 2015 sempat di berhentikan untuk perundingan yang selanjutnya, pemberhentian sementara itu disebabkan karena hubungan Politik. Pada proses pemberhentian tersebut, dari kedua belah pihak antara Indonesia dengan Australia mencari cara untuk memperbaikinya. Tahap perundingan ke Tiga dilanjutkan kembali yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2016 bertempat di Yogyakarta, pada tahap perundingan ke tiga ini menghadirkan beberapa para petinggi perusahaan yaitu, Pertanian, Pendidikan, Pariwisata dan Perdagangan. Perundingan ini dilanjutkan karena hubungan kedua negara sudah mulai membaik, Pihak dari kementerian perdagangan Indonesia menemui pihak Australia. Kedua menteri

perdagangan tersebut memutuskan untuk melanjutkan kembali pada tahap perundingan ke 3. Dan hasil untuk tahap perundingan ke 3 ini membawa dampak positif, kedua negara sudah mulai menyepakati proses kerjasama tersebut. Dan akan secepatnya menuju proses perundingan tahap akhir, yang bertujuan untuk menyepakati hubungan kerjasama kedua negara ini yang disebut IACEPA. (Heni, Hubungan Bilateral, Kementerian Perdagangan. (26 Juli 2016))

Sektor utama yang akan dikerjasamakan dalam IA-CEPA antara lain bidang peternakan sapi, agrikultur terutama kedelai dan gandum. Indonesia berharap dapat memperoleh alih teknologi peternakan dan pangan Australia dari sektor hulu hingga ke hilir. Selama ini, Indonesia menjadi tujuan ekspor daging terbesar dari Australia. Dengan konsumsi daging 2 kilogram/kapita, Indonesia masih mengalami defisit daging dan harus mengimpor dari Australia. (PRLM, 2012, slide 1).

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sebagai tindak lanjut Pertemuan Tahunan Kepala Pemerintahan yang ke-2 (*The 2nd Annual Leaders Meeting/ALM 2*), di Darwin, Australia, tanggal 2-4 Juli 2012, telah dilakukan perundingan awal IA-CEPA. Tahap perundingan pertama IA-CEPA di Jakarta diselenggarakan pada tanggal 26-27 Maret 2012. Adapun hasil-hasil pertemuan antara lain :

1. Pentingnya memperluas perdagangan dan investasi kedua negara Indonesia dan Australia ; menindaklanjuti outcome dari ASEAN-Australia-New Zealand FTA (ANZFTA) yang telah *entry into force* bagi Indonesia pada bulan Januari 2012, dengan memperhatikan perkembangan di fora regional dan multilateral;
2. Pentingnya merangkul erat para stakeholders termasuk sektor bisnis dan non pemerintah. Kedua pihak sepakat untuk menunggu arahan dari pertemuan Menteri Perdagangan kedua negara (*Trade Ministers' Meeting ke-10*) tanggal 12 Oktober 2012), serta selesainya laporan Business Partnership Group sebelum memfinalisasi dokumen *guiding principles and objectives*. Kedua pihak sepakat adanya suatu *Trade Negotiating Committee (TNC)* untuk mengawasi negosiasi IA-CEPA, dengan didukung oleh Negotiating Groups. Annual Leaders' meeting Ke-2 Indonesia-Australia Di Darwin (2-4 Juli 2012)

Kunjungan kerja Presiden RI ke Darwin tersebut telah memberikan arti yang sangat strategis dalam penguatan komitmen kedua negara untuk pengembangan hubungan kerja sama yang lebih kuat, semakin matang dan komprehensif. Hal ini tercermin dari substansi pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Australia yang menyatakan bahwa di bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi guna mencapai target perdagangan US\$ 15 miliar pada tahun 2015 dan seiring pemberlakuan AANZFTA bagi Indonesia pada 10 Januari 2012, kedua pemimpin menyepakati peluncuran negosiasi formal pertama Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada akhir tahun 2012. Australia menginvestasikan USD 100 juta dalam program pembibitan sapi (*breeding*). Presiden RI telah mengundang pihak PM Australia untuk mendorong kemitraan dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan konektivitas antara Indonesia dan Australia, khususnya antara Northern Territory dengan wilayah RI koridor 5 dan 6 MP3EI (Bali, NTB, NTT, Papua dan Maluku). Diharapkan bahwa peningkatan konektivitas tersebut dapat bersinergi dengan kerja sama ekonomi lainnya di kawasan seperti BIMP-EAGA, IMT-GT dan SIJORI. (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012, www.ekon.go.id).

Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka lebar hubungan kerja sama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Dengan terbentuknya *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadikan landasan bagi peningkatan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan. Keberadaan FTA bilateral Indonesia dan Australia diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral mengingat komplementaritas kedua negara dan jarak yang berdekatan. Selain itu, pada tahun 2010 Australia dan Indonesia juga menyepakati kerjasama *Economic Partnership Agreement* (Anonim, Edisi 3, 2010, hal. 14-15).

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia adalah kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Kerjasama ekspor impor daging sapi ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia.

Indonesia belum mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mampu memproduksi 70% dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. Berdasarkan data Pusdatin tahun 2012 Australia merupakan sumber dari 90,06% impor sapi hidup dan 46,70% impor daging sapi dan jeroan. Selandia Baru merupakan sumber impor 32,52 % daging sapi dan jeroan (Chalib Thalib dan Yudi Guntara Noor, Bogor. 2008, hal. 45).

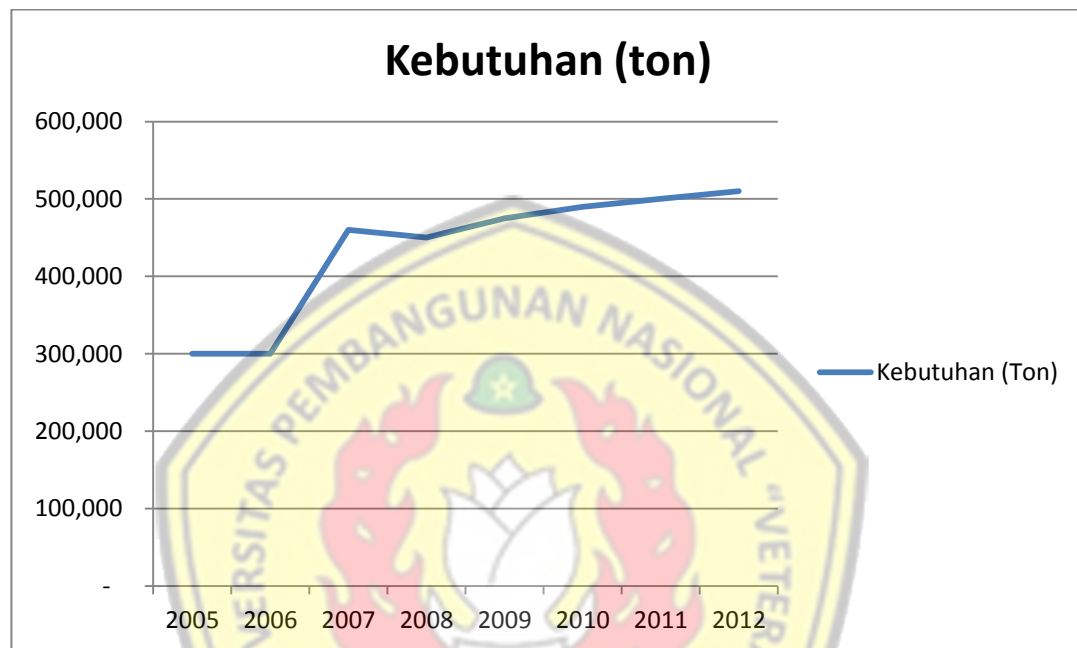
Indonesia menjadikan Australia sebagai sumber impor ternak sapi dan daging sapi yang jumlahnya cukup besar. Besarnya impor ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan kesejahteraan dan pertambahan penduduk. Selain itu, juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepedulian penduduk akan pentingnya kebutuhan protein hewani.

Untuk memperoleh manfaat ekonomi, maka peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang timbul dari FTA (*Free Trade Area*) akan memberikan peluang untuk dapat meminimalkan biaya transaksi yang disertai dengan adanya perdagangan dan investasi secara bilateral. Hal ini juga ditunjukkan dengan kesepakatan kedua Menteri Perdagangan pada tanggal 9 Maret 2010 untuk memperluas format IAFTA (*Indonesia-Australia Free Trade Area*) menjadi IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) yang memasukkan elemen economic dan *capacity building*.

Tingkat kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk, pendapatan perkapita

berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi. Sedangkan ketersediaan daging sapi masih sangat minim, sehingga sering terjadi gejolak harga daging sapi di pasaran yang tidak kondusif.

Grafik 1. Kebutuhan Daging Masyarakat Indonesia



Sumber: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Konsumsi daging sapi per tiap rumah tangga penduduk Indonesia rata-rata sebesar 1,8-2,09 kg/Kapita/Tahun. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa konsumsi daging penduduk Indonesia terus meningkat. Namun peningkatan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi daging sapi di beberapa negara lain seperti Malaysia (7kg/kapita/tahun), Singapura (7kg/kapita/tahun), Philipina (4kg/kapita/tahun), Jepang (10kg/kapita/tahun), Jerman (50kg/kapita/tahun), dan Australia (36kg/kapita/tahun). Hingga tahun 2015 Konsumsi daging sapi penduduk Indonesia terus meningkat.

Hingga saat ini, kebutuhan daging sapi penduduk Indonesia yang terus meningkat belum mampu terpenuhi dari produksi daging sapi lokal. Untuk itu, cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan cara mengimpor daging dari

negara lain. Di pasar dunia, daging sapi merupakan salah satu produk hewani yang cukup tinggi. Produksi daging dunia selama tahun 2010 sampai tahun 2012 terus meningkat. Tahun 2011 produksi daging dunia mencapai 297,2 juta ton dimana daging sapi sebesar 67,5 juta ton. Produksi daging sapi selama tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak ada perubahan yaitu rata-rata produksi dunia sebesar 67,5 juta ton. Saat ini status Indonesia masih berstatus sebagai negara pengimpor sapi hidup (sapi bibit dan sapi bakalan atau sapi potong) dan produk daging termasuk jeroan. Negara-negara pemasok sapi dan daging utama di dunia yang telah memenuhi syarat teknis menyangkut Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) dan zoonotic serta mempunyai letak geografis yang menguntungkan masih terbatas jumlahnya. Hal 39 ini menyebabkan Indonesia hanya mengimpor sapi dan daging sapi hanya dari negara tertentu saja.

Saat kebijakan swasembada daging dicanangkan akhir tahun 2009, target produksi daging sapi lokal ditetapkan 420.000 ton pada akhir 2014, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,2% per tahun. Dengan basis konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, Indonesia butuh 350.000-400.000 sapi per tahun. Berdasarkan sensus, laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun sehingga kebutuhan daging sapi akan lebih dari 500.000 ton pada akhir 2014. Pemerintah merencanakan pengurangan kuota impor sapi secara bertahap. Target penurunan kuota impor dimulai tahun 2012 sebesar 20%, 2013 sebesar 15%, dan 2014 sebesar 10%. Indonesia mengandalkan impor sapi dari Australia dan Selandia Baru. Berikut Tabel kuota Impor Sapi dan daging sapi dari Australia :

Tabel 1. Kuota Impor Sapi dan Daging Sapi Australia

Tahun	Sapi (ribu ekor)	Daging Sapi Beku (ribu ton)
2009	765	110
2010	521	120
2011	560	100
2012	283	41
2013	276	32
2014	729	85
2015 hingga Juni	298	40

Sumber: Kementerian Pertanian & Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI serta Badan Karantina Pertanian (Barantan)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa di awal tahun 2009 dan 2010 impor daging sapi beku meningkat dan merupakan yang tertinggi hingga tahun 2015. Menurunnya impor semenjak tahun 2011 hingga 2013 tersebut di karenakan adanya pemberlakuan regulasi pemerintah untuk tidak diperbolehkan adanya dominasi impor dari satu Negara. Hal ini dipicu karena Indonesia berpendapat bahwa Australia sudah tidak komitmen dengan perjanjian IA-CEPA dimana harus ada timbal balik berupa investasi di Indonesia. Padatahun 2014 tercatat impor daging sapi beku mulai meningkat cukup signifikan dari 32 ribu ton di tahun 2013 menjadi 85 ribu ton. Termasuk juga dengan sapi bakalan mencapai 729.400 ekor. Jumlah yang diimpor tahun 2014 tersebut masih sisa untuk stok awal tahun 2015 sebesar 261.100 ekor. Sedangkan realisasi impor sapi bakalan 2015 itu terdiri dari kuartal I (Januari-Maret) yaitu 97.618 dari target 100.000 ekor sedangkan kuartal II (April-Juni) terealisasi 201.643 dari target 267.624 ekor. Sedangkan tahun 2015 masih menyisakan kuartal III dan IV yang berpeluang kembali mendatangkan sapi bakalan impor totalnya mencapai 500.000-600.000 ekor. (Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI). Hal ini dipicu karena permintaan akan kebutuhan daging sapi di masyarakat terus meningkat, sedangkan impor daging sapi yang terbaik adalah dari Australia dibanding dengan

negara lain setelah di coba beberapa tahun sebelumnya. Selain itu juga hubungan bilateral antara Indonesia – Australia juga mulai membaik.

Implementasi dari kerjasama Indonesia – Australia dalam IA-CEPA adalah untuk mempererat hubungan diplomatik dalam perdagangan dan investasi khususnya di bidang daging sapi. Pemerintah berkomitmen melakukan swasembada daging sapi untuk meningkatkan populasi sapi lokal dan menurunkan kuota impor daging sapi. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Diharapkan kuota akan melindungi barang barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Harga daging sapi terus bergejolak setelah pemerintah memberlakukan penurunan kuota impor. Tahun 2013 diperkirakan total kebutuhan daging nasional sebanyak 521.000 ton, 441.000 ton dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan 80.000 ton lainnya dimpor. Kuota impor daging sapi sebesar 80.000 ton tersebut terdiri atas 32.000 ton daging beku dan 276 ribu ekor sapi setara dengan 48 ribu ton daging.

Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi sapi serta produk daging sapi Australia dan negara lain, tetapi menjadi bagian dari rantai distribusi makanan dunia. Untuk itu, melalui kemitraan dengan Australia, Indonesia dapat memasarkan produk-produk daging halal ke pasar ASEAN, Asia, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Agar pengembangan ternak sapi di dalam negeri sebagai upaya swasembada pangan, dapat diwujudkan secara optimal maka harus bermitra dengan negara-negara maju yang telah berhasil mengembangkannya. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis berkeinginan untuk membahas **“Kerjasama Indonesia – Australia Pada Sektor Daging Sapi 2012 - 2015”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kerjasama Indonesia – Australiapada sektor daging sapi 2012 – 2015 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini memiliki tujuan :

1. Untuk menjelaskan serangkaian informasi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengkaji kerjasama Indonesia – Australia dalam Sektor Daging Sapi 2012 - 2015
2. Untuk menganalisisupaya kerjasama Indonesia– Australiadalam sektor daging sapi 2012 – 2015.
3. Menganalisa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam sektor daging sapi di Indonesia periode 2012 – 2015.

I.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini membuat suatu yang diharapkan agar :

1. Praktis :Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kerjasama Indonesia-Australia pada sektor daging sapi 2012 - 2015.
2. Akademis : dapat memberikan serangkaian informasi dan penjelasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengkaji Kerjasama Indonesia – Australia pada Sektor Daging Sapi 2012 – 2015

I.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki kemiripan dan atau berhubungan dengan penelitian ini.

Berikut beberapa karya akademis:

Skripsi karya Nini Salwa Istiqamah (HI, Universitas Hassanudin 2014) dengan judul “Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi”.

Dijelaskan dalam Bab 1 bahwa salah satu bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia adalah kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Kerjasama ekspor impor daging sapi ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia. Pada Bab 2 menerangkan bahwa dalam mengkaji hubungan kerjasama perdagangan daging sapi Indonesia dan Australia dibutuhkan konsep dan teori untuk menganalisis. Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kerjasama internasional. Bab 3 menerangkan tentang Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia. Dijelaskan bahwa Indonesia dan Australia memasuki tahap penting dalam peningkatan ekonomi kedua negara dengan dimulainya perundingan putaran pertama dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2012 di Jakarta. Kedua kepala negara sepakat untuk membentuk IA-CEPA yang idealnya merupakan top up dari ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement.

Kontribusi dalam penulisan skripsi di gunakan pada bagian Latar Belakang Masalah dimana di jelaskan mengenai IA-CEPA.

Perbedaan skripsi tersebut dengan karya penulis adalah bahwa penulis tidak membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Australia dan juga perekonomiannya khususnya di bidang ekspor sapi. Serta peristiwa tahun 2011 dimana media Australia menayangkan praktek pemotongan hewan di beberapa RPH di Indonesia berpengaruh terhadap kebijakan ekspor sapi Australia. Sebab, setelah penayangan tersebut pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan ekspor sapi ke Indonesia. Kebijakan tersebut terlalu cepat diputuskan sehingga menyebabkan kerugian bagi pengusaha sapi Australia sendiri. Hingga akhirnya pemerintah Australia

mencabut kembali larangan tersebut. Penulis lebih mendalami pembahasan pada proses kesepakatan IA-CEPA. Serta langkah nyata apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging sapi yang selama ini masih belum bisa terpenuhi.

Skripsi karya Reni Efrida Pulungan (HI, Universitas Riau 2014) dengan judul “Dampak Kebijakan Indonesia Membatasi Kuota Impor Daging Sapi dari Australia”.

Dijelaskan dalam Bab 1 bahwa kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan juga meningkatnya konsumsi rumah tangga akan daging sapi, membuat kebutuhan daging sapi tidak terpenuhi oleh peternak lokal, dengan kebutuhan yang semakin meningkat pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mengimpor daging sapi dari Australia. Pada Bab 2 menerangkan bahwa dalam mengkaji kebijakan Indonesia membatasi kuota impor daging sapi dari Australia di butuhkan teori penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) untuk menentukan jumlah kuota yang tepat. Di Bab 3 menerangkan tentang Komitmen Pemerintah dalam melakukan swasembada daging sapi untuk meningkatkan populasi sapi lokal dan menurunkan kuota impor daging sapi. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Diharapkan kuota akan melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Harga daging sapi terus bergejolak setelah pemerintah memberlakukan penurunan kuota impor.

Kontribusi dalam penulisan skripsi di gunakan pada bagian Latar Belakang Masalah dimana di jelaskan mengenai swasembada daging sapi untuk meningkatkan populasi sapi lokal dan menurunkan kuota impor daging sapi.

Perbedaan skripsi tersebut dengan karya penulis adalah bahwa penulis tidak membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pembatasan kuota daging sapi impor asal Australia. Namun lebih pada tindakan nyata apa saja yang sudah dan sedang dilakukan dalam kerjasama dalam menanggulangi kebutuhan yang

setiap tahunnya selalu meningkat dimana Indonesia masih memerlukan pasokan impor daging sapi dari Australia.

Makalah karya Nyak Ilham (2001) dengan judul “Analisis Penawaran dan Permintaan Daging Sapi di Indonesia”

Dijelaskan dalam Bab 1 bahwa laju pertumbuhan konsumsi daging sapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan produksi daging sapi. Sejak tahun 1990, selain dari usaha peternakan rakyat, produksi daging sapi Indonesia ada juga yang dihasilkan dari Industri Peternakan (*feedlotter*). Pada Bab 2 menerangkan bahwa analisis data dilakukan dengan pendekatan ekonometrika menggunakan metode 3SLS dan diikuti dengan analisis elastisitas. Di Bab 3 menerangkan tentang lima kesimpulan penting dari hasil penelitian ini, yaitu: (1) penawaran daging sapi dari peternakan rakyat dipengaruhi oleh selisih harga daging sapi, dan penawaran dari industri peternakan rakyat, (2) penawaran industri peternakan rakyat dipengaruhi oleh harga daging sapi, harga sapi bakalan impor dan tingkat sukubunga, (3) impor daging sapi dipengaruhi oleh tarif impor, (4) permintaan daging sapi dipengaruhi oleh harga daging sapi dan harga ikan. (5) harga daging sapi domestik dipengaruhi oleh harga daging sapi impor, harga ternak sapi, dan penawaran daging sapi domestik.

Kontribusi dalam penulisan skripsi di gunakan pada bagian Latar Belakang Masalah dimana di jelaskan mengenai usaha peternakan rakyat, produksi daging sapi Indonesia serta ada juga yang dihasilkan dari Industri Peternakan (*feedlotter*).

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pembahasan tidak focus pada metode pendekatan ekonometrika yang diikuti dengan analisis elastisitas.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Kepentingan Nasional Ekonomi

Teori Kepentingan Nasional Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam national interest terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan

nasional. suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya. (MacMillan publishing Company 1988, hlm.29)

Kepentingan ekonomi nasional merupakan turunan dari kepentingan nasional. George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (national interest) dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif. Kepentingan ekonomi nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah ekonomi mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan ekonomi serta kesejahteraan.

Kepentingan Indonesia dalam hal ekonomi sangat diperjuangkan, karena dalam hal ini rakyat lebih diutamakan dalam kesejahteraannya. Maka dari itu Indonesia terus menerus peternakan dalam hal impor daging sapi Indonesia Australia.

Inti dari pada kepentingan nasional, sebagaimana telah dikatakan oleh Joseph Frankel (1988) adalah :

“In essence (national interest), amounts to the sum total of all the national values, national in both meaning of the world, both pertaining to the nation and to the state”.

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara /bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan (*prosperity*)

I.6.2 Konsep Kemitraan Ekonomi (CEPA)

Shekhar Sengar (2014) mengatakan bahwa FTA (*Free Trade Agreement*) dan CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bidang ekonomi antara negara-negara yang bertujuan untuk mengurangi tarif dan meningkatkan perdagangan bilateral. Sedangkan FTA singkatan Free Trade Agreement, CEPA singkatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Meskipun keduanya bidang ekonomi, ada perbedaan antara keduanya. Tidak seperti FTA, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas, CEPA bertujuan menurunkan hambatan perdagangan bukan penghapusan lengkap, tetapi mencakup area yang lebih besar dari kerjasama luar perdagangan seperti investasi, bantuan ekonomi, kerjasama teknologi dan lain-lain.

Perjanjian perdagangan bebas adalah tingkat terendah dari integrasi ekonomi, terutama, antara dua atau lebih negara perdagangan. Di negara-negara anggota FTA setuju untuk mengurangi bea cukai pada item sepakat untuk level nol dalam satu pertarungan atau secara bertahap. Namun, FTA tidak menyebutkan daerah lain kerjasama. Di sisi lain Economic Partnership Agreement yang luas meliputi bidang kerjasama lainnya seperti investasi, bantuan keuangan, kerjasama teknologi, penelitian dan pengembangan dan lain-lain. Sejauh pengurangan bea masuk untuk level nol yang bersangkutan FTA muncul menguntungkan. Tapi CEPA adalah bagian

dari FTA. Meskipun CEPA tidak berkomitmen untuk menurunkan bea cukai untuk tingkat nol, namun turut mengurangi dengan cara yang sama bijak dan juga mencakup banyak daerah lain untuk bekerjasama.

Tujuan kerjasama ekonomi internasional (Marisa Wajdi. 2013) :

1. membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Salah satu caranya dengan pemberian bantuan pendidikan
2. membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Untuk itu negara-negara berkembang diberi bantuan modal, teknik, dan manajemen
3. memajukan perdagangan, yaitu dengan membentuk badan-badan kerja sama ekonomi regional maupun multilateral
4. memajukan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, yang dilakukan dengan program-program seperti memberi kesempatan pada negara-negara yang sedang berkembang mengeksport barang dan jasanya, memberi kemudahan prosedur ekspor-impor, membantu promosi, serta mencari mitra atau rekanan usaha dari negara-negara maju.

Bentuk kerjasama Ekonomi Internasional terbagi dalam beberapa bidang yaitu :

a. Bidang keuangan

Kerjasama ekonomi di bidang keuangan ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contoh kerja sama bidang keuangan adalah IMF dan Bank Dunia.

b. Bidang perdagangan

Kerjasama di bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk di dalamnya masalah pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain bagi negara-negara anggota. Bentuk badan kerja sama ini antara lain WTO, APEC, dan GATT.

c. Bidang perburuhan

Kerjasama di bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup dan

kesehatan buruh bagi negaranegara anggota. Contoh badan kerja sama ini adalah ILO (*International Labour Organization*).

d. Bidang pasar bersama

Bidang kerjasama ini memberikan keleluasaan kepada anggota untuk melakukan transaksi perdagangan dengan sesama anggota.

Awal mula hubungan Indonesia dan Australia terjadi karena Australia merupakan salah satu negara Barat yang simpatik terhadap perjuangan Indonesia yang ingin lepas dari belenggu penjajahan dan mencapai suatu kemerdekaan. Dinamika hubungan Indonesia dengan Australia bersifat naik-turun kadang kala hubungan kedua negara ini membaik tapi tidak jarang juga bersitegang. Hubungan Australia dan Indonesia menjadi beku karena Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri terkesan militan.

Di bidang ekonomi Indonesia dan Australia dengan gembira mengumumkan kesepakatan untuk memulai negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat.

"Pada 2015, konsumsi daging sapi Indonesia yang mencapai 530.000ton akan melebihi produksi dalam negeri. Bersama kita dapat melakukan yang lebih dari semata-mata memuaskan permintaan domestik yang meningkat dan menjamin pasokan daging sapi yang stabil untuk Indonesia. Kita dapat membantu rantai nilai untuk memuaskan pasar-pasar dunia," ujar Rudd. Rudd juga mengatakan Australia juga dapat menyediakan teknologigenetis untuk membantu Indonesia menumbuhkan ternak Indonesia Akan Beli Peternakan Australia untuk Amankan Pasokan Daging Pemerintah Indonesia berencana membeli peternakan di Australia untuk mengamankan pasokan daging dan meningkatkan keterampilan beternak. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membeli peternakan di Australia untuk mengamankan pasokan daging dan untuk mempromosikan keterampilan beternak, meniru langkah-langkah yang diambil Negara-negara ekonomi baru lainnya seperti China, untuk berinvestasi di luar negeri pada sektor pertanian dan pemrosesan

makanan. Investasi yang direncanakan tersebut, yang masih dalam tahap awal dan memerlukan persetujuan dari Canberra dapat memperbaiki hubungan antara kedua tetangga menyusul konflik perdagangan yang mengarah ada penangguhan penjualan ternak hidup dan pemberlakuan kuota-kuota dagang sapi.

Australia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia dan menempati urutan ke Sembilan sebagai negara utama tujuan ekspor. Secara khusus dalam perkembangan perdagangan dengan Australia posisi Indonesia di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya adalah sebagai berikut : Indonesia menempati posisi ke-3 sebagai negara tujuan ekspor Australia setelah Thailand dan Singapura. Pertemuan Tahunan Para Pemimpin Indonesia-Australia merupakan forum pertemuan tahunan tertinggi antara kepala pemerintahan kedua negara. Pertemuan pertama diselenggarakan di Bali pada bulan November 2011. Pertemuan kedua diselenggarakan di Darwin Northern Territory pada bulan Juli 2012. Selain dengan Australia, Indonesia mempunyai mekanisme pertemuan tahunan serupa dengan Malaysia dan Singapura. Forum ini dibentuk sebagai wahana bagi Kepala Pemerintahan RI dan Australia untuk mengevaluasi kemajuan kerjasama bilateral, serta memberikan arahan bagi upaya memajukannya di masa datang. Pada pertemuan di Darwin, misalnya, kedua pemimpin negara menyepakati peluncuran negosiasi formal Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA).

Australia, yang memiliki rencana ambisius untuk mendorong ekspor makanan ke Asia untuk memasok kelas menengah yang jumlahnya semakin meningkat, mengekspor sekitar 750.000 ternak setahun untuk Indonesia sebelum larangan ekspor diberlakukan. Namun pada dua tahun terakhir, kuota ekspor telah turun menjadi sekitar 250.000 (RI-Australia Sepakati Pertemuan Regional Terkait Pencari Suaka, Andy Lala Waluyo)

Bagi Australia berdagang sapi dengan Indonesia sangat nyaman, karena disamping impor sapi ke Indonesia menyerap hampir 50% produksi sapi di Australia untuk keperluan ekspor, hampir tidak ada timbal balik yang harus diberikan ke

Indonesia dalam menyeimbangkan ketimbangan perdagangan antar kedua negara. Saat ini Indonesia mengimpor sapi, gandum dan kapas dari Australia dalam jumlah yang sangat besar, namun sangat sedikit sekali produk pertanian Indonesia yang diekspor ke Australia. Australia bahkan tidak mengimpor sama sekali produksi minyak sawit Indonesia.

Inti permasalahannya adalah bagaimana memutus ketergantungan terhadap sapi impor Australia yang sudah sangat kronis ini. Kalaupun stok daging nasional memang masih kurang impor sapi dari Australia tidak harus sebesar itu bukan? Masih banyak negara lain yang dapat menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan daging daging tersebut dalam jumlah yang terkendali. Salah satu alternatif yang dapat saja dilakukan adalah mengimpor daging beku dalam jumlah yang sangat terbatas dari negara lain selain Australia seperti Amerika dan negara Amerika latin lainnya, seperti Brazil , Argentina serta New Zealand untuk menjaga suplai daging dalam negeri.

Ketergantungan terhadap impor sapi dari Australia yang sangat kronis ini terkait dengan status Indonesia yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku, sehingga negara tempat Indonesia mengimpor sapi juga harus dari negara yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Kali ini mau tidak mau pemerintah harus secara tuntas membereskan pekerjaan rumah terkait dengan produksi daging dalam negeri dan importasi sapi ini, termasuk di dalamnya segera memodifikasi peraturan dan undang-undang yang membatasi wilayah impor sapi.

Pembuatan zonasi wilayah impor merupakan salah satu solusinya, dimana jika ada negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku tidak harus dilarang sebagai tempat untuk mengimpor sapi. Pastilah dapat kita pelajari dan perkirakan bahwa misalnya negara India yang merupakan salah satu produsen sapi dunia walaupun belum tercatat sebagai negara yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku pasti ada di wilayah peternakan di negara tersebut yang terbebas dari penyakit tersebut. Sistem zonasi ini dan juga sistem karantina wilayah tempat penampungan sementara impor ini untuk dijadikan wilayah karantina akan menjadi sistem biosekuriti yang dapat dilakukan asalkan disertai dengan niat dan upaya yang serius.

Momentum pengurangan kuota impor sapi dari Australia ini merupakan momen tepat untuk membenahi sistem per sapi an di Indonesia. Sudah saatnya kita memulai upaya untuk tidak menggantungkan diri pada negara tertentu saja dalam mengimpor sapi ini. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih pada peternak sapi local dan sudah saatnya juga pemerintah untuk memutus tradisi impor yang sudah sangat kronis ini. Kemandiran pangan merupakan harga diri bangsa, oleh sebab itu langkah nyata harus segera dilakukan, dalam kasus sapi ini retorika tidak diperlukan lagi.

I.6.3 IA-CEPA

IACEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement*) adalah sebuah perjanjian antar Indonesia dan Australia yang memfokuskan dalam peningkatan hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Menurut Himawan Hariyoga Deputy Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal kesepakatan antara kedua negara tercapai pada pertemuan kedua “Kemitraan Indonesia-Australia Partnership untuk Keamanan Pangan Sektor Daging Merah dan Sapi”. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mensinergikan kekuatan dan potensi kedua negara pada sektor ternak dan daging sapi, serta menciptakan daya saing dalam bidang investasi yang akan dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Jika melihat kedekatan geografis antara dua perekonomian regional terbesar ini, salah satu bidang yang masih kurang berkembang adalah bidang perdagangan dan investasi. Bagi Australia, Indonesia adalah mitra dagang ke 12 dan pasar ekspor ke 11 terbesar yaitu mencapai \$14.9 Milyar di tahun 2013. Sebaliknya, bagi Indonesia, Australia adalah mitra dagang terbesar ke 9 dan pasar ekspor terbesar ke 9. Sejalan dengan itu, investasi timbal balik antara kedua negara relatif kecil. Australia sendiri di tahun 2013 telah berinvestasi senilai \$10.9 Milyar dan sebanyak lebih dari 400 perusahaan Australia telah beroperasi di Indonesia.

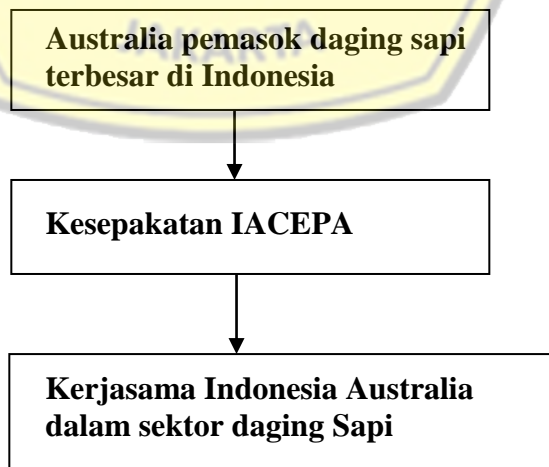
Tujuan dengan adanya IA-CEPA diharapkan hubungan ekonomi antar kedua Negara dapat terbentuk secara komprehensif dan saling menguntungkan. Disamping

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan IA-CEPA juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua Negara. Perkembangan terbaru bahwa Australia juga telah mencabut larangan ekspor ternak hidup ke Indonesia. Dalam upaya untuk menjaga hubungan baik perdagangan bilateral, kedua Negara akan terus saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Adapun keuntungan dan manfaat IA-CEPA (**Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government**) sebagai berikut :

- IA- CEPA bisa mengatasi hambatan perdagangan bilateral , termasuk yang membebankan biaya tambahan pada eksportir dan konsumen , dan menghambat daya saing ekonomi.
- Sebuah perjanjian komprehensif yang membahas hambatan untuk meningkatkan investasi Australia di Indonesia dan investasi Indonesia di Australia akan meningkatkan hubungan bilateral dalam sejumlah hal penting .
- IA - CEPA bisa mengeksplorasi cara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di sektor-sektor tertentu yang diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi .

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata “*methodos*” yang terdiri dari kata “*metho*” yaitu melewati, menempuh atau melalui dan kata “*hodos*” yang berarti cara atau jalan. Metode artinya cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh. Sedangkan menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. *Metodologi* secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*” dan “*logos*”. Kata “*logos*” berarti ilmu atau yang bersifat ilmiah. Jadi metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan penelusuran dengan urutan atau tatacara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah (Hamid Darmadi, 1994, hlm 1)

I.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan fenomena IACEPA pada kerjasama Indonesia-Australia dalam sektor daging sapi periode 2012-2015.

Jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat menganalisa fenomena tersebut.

I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui riset berupa hasil wawancara dan dokumen resmi yang dikeluarkan dengan pihak terkait di Kementerian Luar Negeri dan kajian keperpustakaan dimana menggunakan sumber-sumber bahan bacaan serta data-data yang tertulis melalui dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel dan juga internet.

Untuk teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara melakukan kegiatan riset seperti wawancara. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature untuk data

sekunder, penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku mengenai teori ataupun artikel online dan website.

I.8.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang terbagi dalam dua jenis, yaitu :

Data primer : sumber data yang digunakan yaitu berupa wawancara dengan pihak terkait di Kementerian Luar Negeri dan wawancara di Kementerian Perdagangan dan pernyataan resmi dan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Perdagangan.

Data sekunder : sumber data yang digunakan yaitu diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku serta jurnal-jurnal terkait dengan kerjasama Indonesia-Australia dalam IA-CEPA sektor daging sapi.

I.8.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.9 Sistematika Pembabakan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II DINAMIKA PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM SEKTOR DAGING SAPI**

Bab kedua akan membahas mengenai dinamika perdagangan Indonesia-Australia dalam IA-CEPA sektor daging sapi.

**BAB III KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM IA-CEPA
SEKTOR DAGING SAPI**

Bab ketiga akan membahas mengenai bagaimana bentuk peran Indonesia-Australia dalam perdagangan sektor daging sapi.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

